

SISTEMATIKA LKPJ SKPD

BAB. I PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum .

Keberadaan Kantor Kesbangpol Kabupaten Purbalingga sebagai Satker yang dinilai cukup strategis dalam rangka pembinaan politik, kesatuan bangsa dan kemasyarakatan di Kabupaten Purbalinggadiatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga nomor 14 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Purbalingga, Satker Kesbangpol, sebagai Satker yang cukup strategis di era Otonomi Daerah keberadaannyasangat dibutuhkan guna mendukung pembinaan / pembangunan politik dalam negeri yang bermuara pada system politik yang kondusif sehingga proses pembangunan dan jalannya roda pembangunan lebih efektif dan efisien.

Sebagaimana dimaklumi bahwa keberadaan kabupaten Purbalingga saat ini dibentuk untuk memenuhi amanah Undang – undang nomor 13 tahun 1950 antara lain bertujuan mensukseskan Otonomi Daerah dengan demikian Kantor Kesbangpol keberadaannya sangat dibutuhkan dan sejalan dengan pembentukan daerah – daerah kabupaten dalam lingkungan provinsi Jawa Tengah yaitu lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas jalannya roda pemerintahan dan proses pembangunan di Kabupaten Purbalingga, khusus dalam pembinaan Kesatuan Bangsa, politik dan kemasyarakatan dalam bingkai NKRI.

B. Gambaran umum Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga.

1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK.)

Dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Purbalingga Bab VIII, pasal 26 maka susunan Organisasi Kantor Kesbangpol terdiri dari :

- a) Kepala Kantor
- b) Sub.Bagian Tata Usaha
- c) Seksi Pembinaan Kesatuan Bangsa.
- d) Seksi pembinaan Sosial Politik
- e) Kelompok jabatan fungsional umum.

2. Tugas pokok dan fungsi.

Tugas pokok Kantor Kesbangpol yaitu melaksanakan pembinaan kesatuan bangsa, kemasyarakatan dan politik berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Fungsi : Dalam melaksanakan tugas pokok Kantor Kesbangpol sebagaimana dimaksud diatas mempunyai fungsi :

- a) Penetapan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa, politik.
- b) Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan, pembinaan dan pengawasan kesatuan bangsa dan politik ;
- c) Pelaksanaan perumusan kebijakan penguatan nilai – nilai Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
- d) Pelaksanaan penguatan nilai – nilai kebangsaan ;
- e) Fasilitasi dan pengelolaan dinamika politik, ekonomi dan sosial budaya ;
- f) Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan ;
- g) Mengadakan fasilitasi dan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat :
- h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati .

3. Kepegawaian.

Kantor Kesbangpol terdapat 20 (dua puluh) orang PNS dengan keterangan sebagai berikut :

- a) Drs.NUR HAMAM.M.Si, NIP. 19620614 198503 1 009, Purbalingga, 14 Juni 1962, Kepala Kantor, Pembina Tingkat I (IV / b), pendidikan S.2 , dan diklat yang diikuti antara lain :
 1. SEPADA (1992)
 2. SUSPIMPEMDAGRI (1993)
 3. ADUMLA (1996)
 4. ORGANISASI DAN METHODE (1994)
 5. BUDAYA KERJA (1995)
 6. DIKLATPIM TK.III (2002)
 7. INTELIJEN TK.DASAR (2011)

- b) WINARKO MARUTO,BA, NIP. 19570621 198403 1 005, Purbalingga, 21 Juni 1984, Kasi Bina Sospol, Penata Tingkat I (III / d), pendidikan Sarjana Muda, diklat yang pernah diikuti :
 1. SPADA
 2. ADUMLA

- c) EDY SETYAWAN,BA, NIP.19571214 198503 1 009, Purbalingga 14 Desember 1957, Kasubag Tata Usaha, Penata Tingkat I (III / d) pendidikan Sarjana Muda, diklat yang pernah diikuti antara lain :
 1. ADUM
 2. ADUMLA
 3. DIKLAT DASAR INTELIJEN.

- d) DWI ANANG PRIO SUHARTONO, NIP. 19640509 198510 1 001, Purbalingga 9 Mei 1964, Kasi Kesbang, Penata (III / c) , pendidikan SMA, diklat yang pernah diikuti antara lain :
 1. ADUM
 2. DIKLAT DASAR SATPOL.PP

- e) HALIS SUMINI, NIP.19580414 198003 2 007, Sragen, 14 April 1958, JFU Pembantu Bendahara Pengeluaran di Sub.bagian Tata Usaha, Penata Muda Tingkat I (III / b), pendidikan SMEA, diklat yang pernah diikuti :
1. ADUM
- f) SUYATNO, NIP.19611215 198508 1 001, Cilacap 15 Desember 1961, JFU pengumpul dan pengolah data pada seksi Bina Sospol, Penata Muda Tingkat I (III / b), pendidikan SMA, diklat yang pernah diikuti antara lain :
1. ADUM.
- g) LASIMIN, NIP. 19650715 198703 1 016, Purbalingga, 15 Juli 1965, JFU Bendahara pengeluaran pada Sub.bagi Tata Usaha, Penata Muda Tingkat I (III / b), pendidikan SMEA, diklat yang pernah diikuti :
1. NIHIL.
- h) SAYIDI, NIP.19650710 199003 1 009, Purbalingga, 10 Juli 1965, JFU pengumpul dan pengolah data pada Seksi Bina Kesbang, Penata Muda Tingkat I (III / b), pendidikan SMA, diklat yang pernah diikuti antara lain :
1. MANAJEMEN PENANGGULANAN BENCANA.
 2. SAR AIR.
- i) AGUS SURIPTO, NIP.19650820 199003 1 009, Purbalingga, 20 Agustus 1965, JFU Staf administrasi keuangan pada Seksi Bina Kesbang, Penata Muda Tingkat I (III / b), pendidikan SMEA, diklat yang pernah diikuti antara lain :
1. BENDAHARA DAERAH.
 2. ADUM
 3. INTELIJEN.

- j) ESTI RIYANTO,NIP.19590408 198607 1 002, Wonosobo, 8 April 1959, JFU penatalaksanaan kepegawaian pada Sub.bag.Tata Usaha, Penata Muda (III / a), pendidikan SMA, diklat yang pernah diikuti antara lain :
1. MANAJEMEN PENANGGULANAN BENCANA.
 2. DIKLAT BELA NEGARA
- k) MULYONO NIP.19660711 199103 1 006, Purbalingga, 11 Juli 1966, JFU pengurus barang pada sub.bag Tata Usaha, Pengatur (II / c) , pendidikan SMA diklat yang pernah diikuti antara lain :
1. NIHIL.
- l) DWI KUSWORO,NIP. 19580815 199102 1 002, Banjarnegara, 15 Agustus 1958, JFU agendaris pada Sub.bag Tata Usaha, Pengatur (II / c), pendidikan ST (SLTP), diklat yang pernah diikuti antara lain
1. NIHIL.
- m) DHANI INDRIYANI.A.Md, NIP.19821208 201012 2 023, Cilacap, 8 Desember 1982, JFU pembantu PPK (Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan) pada Sub.bag Tata Usaha, Pengatur (II / c), pendidikan D.3 Akutansi, diklat yang pernah diikuti :
1. NIHIL .
- n) LASTONO,NIP.19651110 198611 1 002, Purbalingga, 10 Nopember 1965, JFU Staf administrasi keuangan pada Seksi Bina Sospol, Pengatur Muda Tingakat I (II / b) , pendidikan SMA, diklat yang pernah diikuti antara lain :
1. DIKLAT SANTEL.
 2. DIKLAT DASAR INTELIJEN
 3. DIKLAT KEORMASAN

- o) HANDAYONO, NIP.19760305 200604 1 020, Purbalingga, 5 Maret 1976, JFU caraka / pengantar surat pada Sub.bag Tata Usaha, Pengatur Muda Tingkat I (II / b), pendidikan MAN (SLTA), diklat yang pernah diikuti antara lain :
1. MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA.
 2. DANTON SATLINMAS.
- p) ASEP SUDARYO, NIP.19750318 200701 1 008, Purbalingga, 18 Maret 1975, JFU penjaga malam pada Sub.bag Tata usaha , Pengatur Muda Tingkat I (II / b), pendidikan SMA, diklat yang pernah diikuti antara lain :
1. NIHIL .
- q) SRI DEWI, NIP.19840701 200701 2 002, Blangkejeren (Aceh),1 Juli 1984, JFU pengumpul dan pengolah data pada Seksi Bina Sospol,Pengatur Muda Tingkat I (II / b), pendidikan SMA, diklat yang pernah diikuti antara lain :
1. NIHIL.
- r) TRI SUSMIYATI HANDAYANI, NIP.19740906 200801 2 011, Kebumen, 6 September 1974, JFU Staf Administrasi keuangan pada Sub.bag.Tata Usaha, Pengatur Muda (II / a) pendidikan SMEA , diklat yang pernah diikuti antara lain :
1. DIKLAT MC.
- s) SAYIDI, NIP.19660614 200701 1 014, Purbalingga, 14 Juni 1966, JFU Tenaga kebersihan pada Sub.bag Tata Usaha, Pengatur Muda (II / a), pendidikan SMA, diklat yang pernah diikuti antara lain :
1. NIHIL.
- t) IMAM BUDI SANTOSA, NIP.19750813 200901 1 009, Purbalingga, 13 Agustus 1975, JFU pengemudi (sopir) pada sub.bag Tata usaha , Pengatur Muda (II / a), pendidikan SMA, diklat yang pernah diikuti antara lain :
1. NIHIL .

PEMBAGIAN STAF ::

- a. Kepala Kantor : Drs.NUR HAMAM.M.Si
 - b. Kasubag Tata Usaha : EDY SETYAWAN.BA
 Staf Subag Tata usaha :
 - 1. HALIS SUMINI / Pembantu Bendahara Pengeluaran.
 - 2. LASIMIN / Bendahara Pengeluaran.
 - 3. ESTI RIYANTO / Penatalaksanaan Kepegawaian.
 - 4. MULYONO / Pengurus Barang.
 - 5. DWI KUSWORO / Agendaris.
 - 6. DHANI INDRIYANI A.Md./ Pembantu PPK
 - 7. HANDAYONO / Caraka (pengantar surat dan barang)
 - 8. ASEP SUDARYO / Penjaga malam.
 - 9. TRI SUSMIYATI HANDAYANI. / Staf Administrasi keuangan.
 - 10. SAYIDI / Tenaga kebersihan.
 - 11. IMAM BUDI SANTOSA./ Pengemudi (sopir Kepala Kantor).
 - c. Kasi Bina Sospol WINARKO MARUTO.BA
 Staf seksi Bina Sospol :
 - 1. SUYATNO / pengumpul dan pengolah data.
 - 2. LASTONO / Staf administrasi keuangan.
 - 3. SRI DEWI / pengumpul dan pengolah data.
 - d. Kasi Bina Kesbang : DWI ANANG PRIO SUHARTONO.
 Staf Seksi Bina Kesbang :
 - 1. SAYIDI / pengumpul dan pengolah data
 - 2. AGUS SURIPTO / Staf administrasi keuangan.
4. Daftar asset yang dikelola (Terlampir) :
- a) KIB B (peralatan dan mesin) terlampir
 - b) KIB C (bangunan dan gedung) terlampir
 - c) KIB D (jalan, irigasi, dan bangunan) terlampir
 - d) KIB E (asset tetap lainnya) terlampir
5. .Kondisi geografis(dibuat khusus kecamatan.)

6. Gambaran umum demografis(dibuat khusus kecamatan)

7. Kondisi ekonomi (nihil)

BAB. II. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH.

A. VISI DAN MISI.

Dalam rangka mendukung visi dan misi pemerintah kabupaten Purbalingga , maka visi Kantor Kesbangpol yaitu “ Terwujudnya kondisi politik yang lebih demokratis, kondisi masyarakat yang aman dan damai dalam rangka mendukung keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia”,

Adapun misi yang ditempuh :

1. Terwujudnya kemantapan wawasan kebangsaan, pembauran dan kesadaran bela Negara.
2. Mewujudkan system politik yang demokratis dan situasi kondusif.

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH

Setelah Visi dan Misi ditetapkan maka strategi dan arah kebijakan yang ditempuh yaitu :

1. Meningkatkan peran Orpol, Ormas, LSM dan pihak terkait dalam upaya memantapkan wawasan kebangsaan, idiologi Pancasila, dan ketahanan bangsa.
2. Meningkatkan pendidikan politik dalam upaya mewujudkan system politik yang demokratis.

C. PRIORITAS DAERAH

Dijabarkan dalam 4 (empat) program dan terurai dalam 17 kegiatan yaitu :

1. Program penguatan kelembagaan daerah yang terinci dalam 5 (lima) kegiatan :
 - a) Kegiatan penyediaan bahan dan jasa perkantoran.
 - b) Kegiatan rapat – rapat koordinasi dan konsultasi.
 - c) Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor.
 - d) Kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai.
 - e) Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor.

2. Program fasilitasi dan pembinaan kehidupan sosial politik yang terinci dalam 6 (enam) kegiatan :
 - a) Kegiatan Forum kerukunan antar umat beragama (FKUB)
 - b) Kegiatan fasilitasi kegiatan Ormas, LSM, dan pemantauan aspirasi masyarakat.
 - c) Kegiatan fasilitasi kegiatan Orpol dan penyusunan data serta peta parpol.
 - d) Kegiatan pengelolaan bantuan keuangan kepada partai politik dan fasilitasi kegiatan partai politik.
 - e) Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).
 - f) Kegiatan fasilitasi program kerja sama Pemda dengan Ormas, LSM dan Lembaga Nirlaba Lainnya.

3. Program peningkatan perlindungan masyarakat yang terinci dalam 3 (tiga) kegiatan :
 - a) Kegiatan Pam Tup Lebaran, Natal, Tahun Baru dan Tamu VVIP.
 - b) Kegiatan pemberdayaan badan koordinasi dan informasi.(Kominda)
 - c) Kegiatan keamanan terpadu.

4. Program pembinaan wawasan kebangsaan yang terinci dalam 3 (tiga) kegiatan :
 - a) Kegiatan sarasehan pembauran etnis.
 - b) Kegiatan forum komunikasi kesatuan bangsa.
 - c) Kegiatan pembekalan wawasan kebangsaan.

BAB. III. KEBIJAKAN UMUMPENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.**A. Pendapatan daerah.****1. Target dan realisasi****a) Belanja Tidak Langsung**

- Target = Rp nihil
- Realisasi = Rp nihil
- Sisa kurang = Rp nihil

b) Belanja Langsung

- Target = Rp nihil
- Realisasi = Rp nihil
- Sisa lebih = Rp nihil

2. Permasalahan dan solusi. (nihil)**B. Pengelolaan belanja daerah.****1. Target dan realisasi****a) Belanja Tidak Langsung**

- Alokasi anggaran Rp 957.991.000,- .
- Realisasi anggaran Rp 943.214.391 (98,46%),-
- Sisa lebih anggaran Rp 14.776.609,-

b) Belanja Langsung

- Alokasi anggaran Rp 1.009.948.000,-
- Realisasi anggaran Rp 972.662.121,-.
- Sisa lebih anggaran Rp 37.285.879,-.

2. Permasalahan dan solusi.

Jumlah anggaran relative terbatas, solusi penerapan prinsip efisiensi dan skala prioritas.

BAB. IV. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH.

Urusan wajib ; Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

1. Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal .
(Terlampir)

2. Realisasi program dan kegiatan :

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dilaksanakan oleh kantor Kesbangpol Kabupaten Purbalingga telah dilaksanakan dengan baik , hal ini dapat dilihat dari tingkat pencapaian beberapa indikator kinerja antara lain sebagai berikut :

- a) Terlaksananya pembinaan politik daerah.
- b) Terlaksananya kegiatan pembinaan terhadap Ormas, LSM dan OKP.

Adapun rincian selengkapnya yaitu sebagai berikut :

- a) Program penguatan kelembagaan daerah terdiri dari :
 - Kegiatan penyediaan bahan dan jasa perkantoran, realisasi program dan kegiatan ini dimaksud yaitu terdukungnya kebutuhan administrasi kantor Kesatuan Bangsa dan politik 1 (satu) paket, berupa ATK, listrik, telepon dengan alokasi dana sebesar Rp 121.060.000,- dan terealisasi dana sebesar Rp 112.978.409,- (93,32 %), permasalahan yang dihadapi yaitu perubahan harga relative cepat kadang sulit diprediksi. Dengan solusi efisiensi penggunaan anggaran.
 - Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terpeliharanya sarana dan prasarana kantor 1 (satu) paket berupa 1 (satu) gedung, 10 kendaraan dan peralatan kantor dengan alokasi dana sebesar Rp 94.046.000,- yang terealisasi sebesar Rp 90.428.400,- (96,15 %) permasalahan yang dihadapi tidak ada dan solusi nihil.
 - Kegiatan rapat – rapat koordinasi dan konsultasi realisasi program dan kegiatan ini terlaksananya rapat – rapat koordiansi dan konsultasi 1 (satu) paket untuk kebutuhan perjalanan dinas dalam dan luar daerah. Alokasi anggaran sebesar Rp 73.172.000,- yang terealisasi anggaran sebesar Rp 71.360.800,- (97,52 %), permasalahan yang dihadapi yaitu berbagai rapat lebih banyak ditentukan oleh tingkat Provinsi (Badan Kesbangpol Linmas Provinsi Jateng) membuat prediksi kebutuhan rapat (biaya rapat menjadi sulit, solusi dengan

cara mempertimbangkan kebutuhan rapat / pelaksanaan rapat ditahun yang lalu, dan peningkatan koordinasi.

- Kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai realisasi pelaksanaan program dan kegiatan ini yaitu terdidiknya PNS yang ada di Kantor Kesbangpol sebanyak 1 orang dengan alokasi anggaran sebesar Rp 12.600.000,- yang terealisasi anggaran sebesar Rp 5.910.000,- (46,90 %), permasalahan yang dihadapi yaitu bahwa sifat dari kegiatan ini adalah mengirimkan peserta diklat sehingga taksiran biaya dan juga waktu pelaksanaan sering tidak sesuai dengan perencanaan solusi yang ditempuh yaitu kedepan dalam menyusun perencanaan mengacu pada pada pelatihan yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya.
 - Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor realisasi dari kegiatan ini yaitu pembelian berupa computer Samsung 2 unit, computer Toshiba 2 buah, printer 1 buah, modem 2 buah, kamera digital 1 buah, alat sandi berupa jam 2 buah, kacamata 2 buah, bolpoint 2 buah, benik 2 buah. Alokasi anggaran sebesar= Rp 58.698.000. Realisas= Rp 58.383.000 (99,46%). Permasalahan berupa komoditi ini sulit didapat, penyedia jasa relatif jauh, persyaratan pembelian relatif rumit. Solusinya yaitu koordinasi yang semakin intensif antara pembeli dan penyedia jasa.
- b) Program fasilitasi dan pembinaan kehidupan sosial politik terdiri dari :
- Kegiatan forum komunikasi antar umat beragama (FKUB) realisasi pelaksanaan program dan kegiatan ini terakomidasinya penyelesaian sengketa pendirian rumah ibadah dan terwujudnya program kerja FKUB melalui forkom bagi pengurus FKUB dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama dengan peserta 350 orang dengan alokasi anggaran sebesar Rp 49.830.000,- yang terealisasi Rp 49.100.012,- (98,54%), kegiatan ini dapat berjalan dengan baik, dan tidak ada permasalahan di tahun 2012 dan tidak ada sengketa pendirian rumah ibadah.

- Kegiatan fasilitasi kegiatan Ormas, LSM dan pemantuan aspirasi masyarakat , realisasi pelaksanaan program dan kegiatan ini terdukungnya kegiatan Ormas, serta terserapnya aspirasi masyarakat melalui kegiatan fasilitasi kegiatan Ormas, LSM dan pemantauan aspirasi masyarakat dengan peserta 75 orang dengan alokasi anggaran sebesar Rp 30.000.000,- yang terealisasi anggaran sebesar Rp 25.310.000,- (84,36 %), kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan Ormas, LSM yang ada di Kabupaten Purbalingga dapat terlayani dengan baik.
- Kegiatan fasilitasi kegiatan Orpol dan penyusunan data serta peta parpol, realisasi pelaksanaan program dan kegiatan ini yaitu terdukungnya / terselenggaranya fasilitasi Orpol dan penyusunan data peta parpol yang berupa dokumen dan kegiatan ini teralokasi dana sebesar Rp 4.998.000,- yang terealisasi sebesar Rp 4.997.000,- (99,98 %), kegiatan ini dapat berjalan dengan baik tidak ada permasalahan yang menonjol (Orpol terlayani dengan baik), tertib administrasi Orpol meningkat pembinaan diikuti 75 orang .
- Kegiatan pengelolaan bantuan keuangan kepada Parpol dan fasilitasi kegiatan parpol , realisasi pelaksanaan program dan kegiatan ini yaitu terselenggaranya kegiatan penyaluran dana kepada parpol sesuai dengan aturan yang berlaku dan penelitian serta pemeriksaan administrasi parpol bagi 9 (sembilan) parpol yang mendapat kursi di DPRD dengan alokasi anggaran sebesar Rp 12.703.000,- yang terealisasi anggaran sebesar Rp 5.538.000,- (43,6%) , kegiatan ini dapat berjalan dengan baik meskipun belum optimal , solusi peningkatan koordinasi dengan pengurus parpol serta peningkatan konsultasi dengan Badan Kesbangpol Linmas Provinsi Jateng di Semarang.
- Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), realisasi pelaksanaan program dan kegiatan ini yaitu terciptanya kerja sama antara FKDM Kabupaten, FKDM Kecamatan dan masyarakat dengan rapat koordinasi yang diikuti 50 orang tokoh agama, tokoh masyarakat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 7.500.000,- yang

terrealisasi sebesar Rp 7.471.000,- (99,61%), kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dengan target 50 orang peserta (memenuhi target).

- Fasilitasi program kerjasama Pemda dengan Ormas, LSM, dan lembaga Nirlaba lainnya. Realisasi pelaksanaan program ini dan kegiatan ini yaitu Pemkab Purbalingga melalui kantor Kesbang pol memberikan dana stimulant kepada 13 organisasi untuk memfasilitasi aktifitas Ormas, LNL yang bekerjasama / mitra Pemda, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 57.094.000 dan realisasi sebesar Rp 55.768.500 (97,68%). Kegiatan ini dapat berjalan baik dan memenuhi target (13 organisasi) .

c) Program peningkatan perlindungan masyarakat terdiri dari :

- Kegiatan Pam Tup Lebaran, Natal dan Tahun Baru dan Tamu VIP realisasi pelaksanaan program dan kegiatan ini yaitu terselenggaranya Pam Tup Lebaran, Natal, Tahun Baru dan Tamu VIP bagi Tim Pam Tup sebanyak 15 orang dengan alokasi anggaran sebesar Rp 13.902.000,- yang terealisasi sebesar Rp 13.872.000,- (99,78%) kegiatan ini berjalan dengan baik dan cukup mendukung petugas pengamanan terbuka sehingga aktifitas masyarakat di hari Raya Lebaran, Natal dan Tahun Baru dapat berjalan lancar dan kondusif selain itu aktifitas Tamu VIP khususnya pejabat baik dari tingkat pusat dan provinsi berjalan lancar dan kondusif.
- Kegiatan pemberdayaan badan koordinasi dan informasi realisasi pelaksanaan program dan kegiatan ini terselenggaranya Rakor Kominda 12 kali yang diikuti 22 orang pengurus dengan sasaran teratasinya ancaman, gangguan dan hambatan serta tantangan melalui upaya deteksi dini dan cegah dini dengan memanfaatkan informasi yang akurat, adapun alokasi dana yang disediakan sebesar Rp 27.000.000,- yang terealisasi sebesar Rp 26.550.000,- (98,33 %) , kegiatan ini dapat berjalan dengan baik serta cukup mendukung stabilitas wilayah (Ipoleksobudkam) di Kabupaten Purbalingga.

- Kegiatan keamanan terpadu , realisasi dari program dan kegiatan ini yaitu terselenggaranya koordinasi antar Muspida sebanyak 6 (enam) Institusi dengan alokasi anggaran sebesar Rp 353.000.000,- yang terealisasi Rp 352.997.500,- (99,99 %) , kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan cukup kondusif situasi di wilayah Kabupaten Purbalingga.
- d) Program pembinaan wawasan kebangsaan terdiri dari :
- Kegiatan sarasehan pembauran etnis , realisasi pelaksanaan program dan kegiatan ini yaitu terwujudnya peningkatan persatuan dan kesatuan antar etnis di Kabupaten Purbalingga (Cina, Arab, Jawa, Padang, Madura dan lain sebagainya) yang diikuti 75 orang dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4.000.000,- yang terealisasi sebesar Rp 3.575.000,- (89,38 %) kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dengan upaya peningkatan pembauran cukup mendukung persatuan dan kesatuan antar Etnis.
 - Kegiatan forum komunikasi kesatuan bangsa, realisasi pelaksanaan program dan kegiatan ini yaitu terselenggaranya forum komunikasi kesatuan bangsa untuk tokoh agama dan tokoh masyarakat 75 orang dengan alokasi anggaran sebesar Rp 14.745.000,- yang terealisasi sebesar Rp 14.598.000,- (99 %) , kegiatan ini cukup efektif dalam rangka peningkatan persatuan dan kesatuan antara Tokoh agama dan tokoh masyarakat , kegiatan ini berjalan dengan baik, relatif tidak ada masalah. Permasalahan dan solusi selama kurun waktu tahun 2012 pada Kantor Kesbangpol seluruh program dan kegiatan secara umum tidak ada permasalahan yang cukup signifikan yang perlu untuk ditampilkan karena seluruh program dan kegiatan dapat berjalan lancar (100 %) bahkan masukan / impact dana ada efisiensi.
 - Kegiatan pembekalan wawasan kebangsaan. Realisasi program dan kegiatan ini yaitu berupa pembekalan bagi Tama sebanyak 900 orang dari 18 kecamatan dengan materi pembekalan berupa bela negara, wawasan kebangsaan. Kegiatan ini cukup mendukung persatuan dan kesatuan di Kabupaten Purbalingga khususnya. Adapun alokasi

anggaran sebesar Rp 75.600.000,- dan realisasi sebesar Rp 73.824.500 (97,65%). Kegiatan merupakan kerjasama Kantor Kesbang Pol dengan Kodim 0702 / Purbalingga dan praktisi, kegiatan ini dapat berjalan dengan baik meskipun belum optimal.

3. Proses perencanaan pembangunan.

Pada prinsipnya program dan kegiatan yang ada di Kantor Kesbang Pol sesuai dengan kebijakan dan program serta kegiatan di tingkat provinsi Jawa Tengah, Cuma berbeda cakupannya (lebih sempit) Sesuai kebijakan di tingkat Kabupaten Purbalingga yaitu sesuai RKPD, Renja SKPD, RKA SKPD yang pada akhirnya dituangkan di DPA sebagai acuan / pedoman program dan kegiatan satu tahun berjalan.

4. Kondisi sarana dan prasarana kantor.

Dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sarana mobilitas khususnya kendaraan dinas roda 2 (dua) kondisinya sangat terbatas dan sudah tua (tidak layak untuk dipakai) sehingga tidak mendukung pelaksanaan tugas.

5. Permasalahan dan solusi :

➤ Permasalahan :

- a. Jumlah PNS sangat terbatas sehingga kinerja belum maksimal.
- b. SDM PNS sangat terbatas sehingga kinerja belum maksimal.
- c. Alokasi dana khususnya belanja langsung terbatas sehingga kurang mendukung pelaksanaan tugas.

➤ Solusi :

- a. Memaksimalkan PNS yang ada.
- b. Efisiensi dana dan mengutamakan skala prioritas, menimbang jumlah dana terbatas.
- c. Mengirimkan diklat PNS untuk peningkatan SDM PNS

6. Hal lain yang perlu di laporkan :

Tidak ada hal lain yang perlu di laporkan.

BAB. V. PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN.

- A. Tugas pembantuan yang diterima (nihil)
- B. Tugas pembantuan yang diberikan (nihil)

BAB. VI. PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN.

- A. Kerja sama antar daerah (nihil)
- B. Kerjasama daerah dengan pihak ketiga (nihil)
- C. Koordinasi dengan Instansi vertikal di daerah.
 - 1) Kebijakan dan kegiatan komunitas Intelijen Daerah (Kominda)
 - Keputusan Bupati Purbalingga nomor 300 / 262 Th. 2012 tanggal 4 Oktober 2012 tentang pembentukan Dewan Pembina Pengurus dan Sekretariat Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Purbalingga.
 - 2) Realisasi pelaksanaan kegiatan
 - a) Instansi Vertikal yang terlibat :
 - Kodim 0702 / Purbalingga
 - Polres Purbalingga.
 - Kejaksaan Negeri Purbalingga.
 - Lanud Wirasaba.
 - BIN
 - Korem 071 / Wijayakusuma
 - Kodam IV / Diponegoro.
 - b) Sumber dan jumlah anggaran.

Sumber anggaran APBD Kabupaten Purbalingga sejumlah Rp 27.000.000,-. Dana sebesar itu untuk membiayai program peningkatan perlindungan masyarakat khususnya kegiatan pemberdayaan badan koordinasi dan informasi (Bakorinfo) bagi 22 anggota Bakorinfo yang pelaksanaannya ada pada Kantor Kesbangpol.
 - c) Jumlah kegiatan Koordinasi yang dilaksanakan
 - Idiologi Pancasila
 - Politik dalam negeri.
 - Ekonomi (sembako,dan komoditi penting lainnya.)
 - Sosial kemasyarakatan (gejala nasional)
 - Budaya (Aliran kepercayaan dan lain sebagainya.)

➤ Keamanan (gangguan keamanan)

- d) Hasil dan manfaat koordinasi terhimpunya berbagai informasi yang akurat (IPOLEKSOSBUDKAMTIB)
- e) Tindak lanjut hasil koordinasi yaitu informasi yang akurat sebagai bahan rakor “ Muspida “,. Informasi yang akurat disampaikan ke Badan Kesbangpol Linmas Provinsi Jateng.
- f) Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan antara lain koordinasi ditingkat bawah khususnya aparat di wilayah relatif mengalami hambatan karena wilayahnya luas, anggaran dan personil terbatas.
- g) Pembinaan batas wilayah (dibuat khusus Kecamatan)
- h) Pencegahan dan penanggulangan bencana. (nihil)
- I) Pengelolaan kawasan khusus. (nihil)
- j) Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum (nihil)

3) Permasalahan dan solusi

Permasalahan yang ada antara lain keterbatasan anggaran dan personil diatasi dengan kerja lembur dan peningkatan koordinasi dengan alat komunikasi yang ada.

Permasalahan berupa wilayah yang relatif luas diatasi dengan membuat jejaring kerja dengan memanfaatkan aparat di wilayah (Muspika).

D. Pembinaan Batas Wilayah **(Dibuat khusus Kecamatan)**

E. Pencegahan dan penanggulangan bencana **(nihil)**

F. Pengelolaan kawasan khusus **(nihil)**

G. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum **(nihil)**

BAB. VII. PENUTUP.

Lampiran .

1. Data Pegawai

a. Jumlah pegawai 20 orang.

b. Kualifikasi pendidikan sebagai berikut :

➤ S.2 = 1 orang

➤ S.1 = -

➤ D.3 = 3 orang

➤ SLTA = 15 orang

➤ SLTP = 1 orang

➤ SD = -

 Jumlah = 20 orang

c. Kualifikasi pangkat / Golongan :

➤ Pembina Tingkat I (IV/b) = 1 orang

➤ Pembina (IV/a) = -

➤ Penata Tingkat I (III/d) = 2 orang

➤ Penata (III/c) = 1 orang

➤ Penata Muda Tingkat I (III/b) = 5 orang

➤ Penata Muda (III/a) = 1 orang

➤ Pengatur Tingkat I (II/d) = -

➤ Pengatur (II/c) = 4 orang

➤ Pengatur Muda Tingkat I (II/b) = 4 orang

➤ Pengatur Muda (II/a) = 2 orang

 Jumlah..... = 20 orang

d. Kualifikasi menurut umur :

➤ 26 tahun s/d 30 tahun = 2 orang

➤ 31 tahun s/d 35 tahun = -

➤ 36 tahun s/d 40 tahun = 4 orang

➤ 41 tahun s/d 45 tahun = -

➤ 46 tahun s/d 50 tahun = 8 orang

➤ 51 tahun s/d 55 tahun = 6 orang

 Jumlah = 20 orang

e. Kualifikasi menurut jenis kelamin :

➤ Laki – laki	= 16 orang
➤ <u>Perempuan</u>	= 4 orang
Jumlah	= 20 orang

f. Kualifikasi menurut agama

➤ Agama Islam	= 20 orang
➤ Agama Kristen	= -
➤ Agama Budha / Hindu	= -
➤ <u>Agama Konghucu</u>	= -
Jumlah	= 20 orang

g. Kualifikasi menurut jabatan :

➤ Struktural	= 4 orang
➤ <u>Fungsional umum</u>	= 16 orang
Jumlah	= 20 orang

h. Diklat struktural :

- Diklat pim II : 1 orang
- Diklat pim III : 2 orang
- Diklat pim IV : 4 orang

2. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) SKPD Tahun 2012 (menyusul)

3. Dokumen Aset (menyusul)

4. Hal lain yang perlu dilaporkan :

Tidak ada hal lain yang perlu dilaporkan.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) SKPD Tahun 2012

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi kantor Kesbangpol pada tahun 2012 mendapatkan alokasi dana belanja tidak langsung Rp 957.991.000,- realisasi Rp 943.214.391,- dan sisa lebih Rp 14.776.609,-. Alokasi belanja langsung sebesar Rp 1.009.948.000,- realisasi Rp 972.662.121,- dan sisa lebih Rp 37.285.879.

Adapun rincian realisasi anggaran belanja langsung berdasarkan kinerja Kantor Kesbangpol kabupaten Purbalingga tahun anggaran 2012 yang terdiri dari 4 program, 17 kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Program Penguatan Kelembagaan Daerah

Rincian kegiatan:

- a. Kegiatan penyediaan bahan dan jasa perkantoran
Alokasi dana Rp 121.060.000, realisasi dana sebesar Rp 112.978.409 (93,32 %). Sisa lebih sebesar Rp 8.081.591.
- b. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
Alokasi dana Rp 73.172.000, realisasi dana sebesar Rp 71.360.800 (97,52 %). Sisa lebih sebesar Rp 1.811.200.
- c. Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana
Alokasi dana Rp 94.046.000, realisasi dana sebesar Rp 90.428.400 (96,15 %). Sisa lebih sebesar Rp 3.671.600.
- d. Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor
Alokasi dana Rp 58.698.000, realisasi dana sebesar Rp 58.383.000 (99,46 %). Sisa lebih sebesar Rp 315.000
- e. Kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai
Alokasi dana Rp 12.600.000, realisasi sebesar Rp 5.910.000 (46,90 %). Sisa lebih sebesar Rp 6.690.000.

2. Program Fasilitasi dan Pembinaan Kehidupan Sosial Politik

Rincian Kegiatan:

- a. Kegiatan forum komunikasi antar umat beragama (FKUB)
Alokasi dana Rp 49.830.000, realisasi dana sebesar Rp 49.100.012 (98,54 %). Sisa lebih sebesar Rp 729.998.
- b. Kegiatan fasilitasi kegiatan Ormas, LSM, dan pemantauan aspirasi masyarakat
Alokasi dana Rp 30.000.000, realisasi sebesar Rp 25.310.000 (84,36 %). Sisa lebih sebesar Rp 4.690.000.
- c. Kegiatan fasilitasi kegiatan Orpol dan penyusunan data serta peta partai politik.
Alokasi dana Rp 4.998.000, realisasi sebesar Rp 4.997.000 (99,98 %). Sisa lebih sebesar Rp 1.000.
- d. Kegiatan pengelolaan bantuan keuangan kepada partai politik dan fasilitasi kegiatan partai politik

Alokasi dana Rp 12.703.000, realisasi sebesar Rp 5.538.000 (43,60%). Sisa lebih sebesar Rp 7.165.000

- e. Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).

Alokasi dana sebesar Rp 7.500.000, realisasi Rp 7.471.000 (99,61 %). Sisa lebih sebesar Rp 29.000.

- f. Kegiatan Fasilitasi Program kerjasama Pemda dengan Ormas, LSM, lembaga Nirlaba lainnya.

Alokasi dan sebesar Rp 57.094.000, realisasi Rp 55.768.500 (97,68%). Sisa lebih Rp 1.325.500.

3. Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat

Rincian kegiatan:

- a. Kegiatan Pam Tup lebaran, natal, dan tahun baru dan tamu VIP

Alokasi dana Rp 13.902.000, realisasi dana sebesar Rp 13.872.000 (99,78%). Sisa lebih sebesar Rp 30.000.

- b. Kegiatan pemberdayaan badan koordinasi dan informasi

Alokasi dana Rp 27.000.000, realisasi sebesar Rp 26.550.000 (99,32 %). Sisa lebih sebesar Rp 450.000.

- c. Kegiatan keamanan terpadu

Alokasi dana Rp 353.000.000, realisasi dana sebesar Rp 352.997.500 (99,99%). Sisa lebih sebesar Rp 2.500.

4. Program Pembinaan Wawasan Kebangsaan

Rincian kegiatan:

- a. Kegiatan sarasehan pembauran etnis

Alokasi dana Rp 4.000.000 %, realisasi sebesar Rp 3.575.000 (89,38 %). Sisa lebih sebesar Rp 425.000.

- b. Kegiatan forum komunikasi kesatuan bangsa

Alokasi dana Rp 14.745.000, realisasi dana sebesar Rp 14.598.000 (99 %). Sisa lebih sebesar Rp 147.000.

- c. Pembekalan wawasan kebangsaan

Alokasi dana Rp 75.600.000, realisasi Rp 73.824.500 (97,65%)

Sisa lebih sebesar Rp 1.775.500.

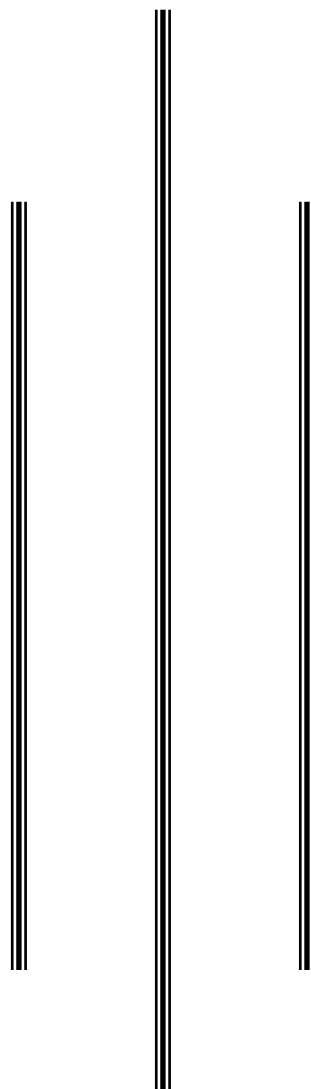
KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PURBALINGGA

Drs. NUR HAMAM, M. Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19620614 198503 1 009

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
(LKPJ)
TAHUN 2012.**



**KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PURBALINGGA**